

PERLINDUNGAN TERUMBU KARANG Melalui Penegakan Hukum

Penulis :

Dr. Dwi Pratiwi Markus, S.H., M.Kn

Dr. Muhammad Ali, M.M., MH

Surandi Woong Arya, S.H., M.H



CV. STRATA PERSADA ACADEMIA

PERLINDUNGAN TERUMBU KARANG

Melalui Penegakan Hukum

Penulis:

Dr. Dwi Pratiwi Markus, S.H., M.Kn

Dr. Muhammad Ali, M.M., M.H

Surandi Woong Arya, S.H., M.H

Editor:

Ahmad Faridz Anwar, S.H., M.H

Desain Cover:

Zaid

Tata Letak:

Katon Pratondo

Ukuran:

i - iv, 1- 64, uk: 15.5x23 cm

ISBN:

978-623-10-8111-7

Cetakan Pertama:

Maret 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by CV. Strata Persada Academia

All Right Reserved

DILARANG KERAS MENERJEMAHKAN, MEMFOTOKOPI, ATAU
MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI
TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

PENERBIT:

CV. Strata Persada Academia

Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183

Website: www.stratapersada.com

Instagram: @stratapersada

Email: admin@stratapersada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, *Perlindungan Terumbu Karang Melalui Penegakan Hukum*, dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengangkat isu krusial mengenai keberlanjutan ekosistem laut, khususnya terumbu karang, yang semakin terancam akibat aktivitas manusia dan lemahnya penegakan hukum.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya kelautan yang luar biasa, termasuk ekosistem terumbu karang yang mendukung keanekaragaman hayati serta kehidupan masyarakat pesisir. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang terus meningkat akibat berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun ulah manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ekosistem ini menjadi suatu keharusan.

Buku ini membahas secara komprehensif tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap terumbu karang, mulai dari konsep dasar dan fungsi ekologisnya, kewajiban negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini, hingga mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menindak perusakan yang terjadi. Selain itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum serta penerapan sanksi diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai upaya konkret yang dapat dilakukan untuk melindungi terumbu karang.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap kelestarian

lingkungan laut. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru serta mendorong langkah-langkah nyata dalam menjaga dan melindungi ekosistem terumbu karang bagi generasi mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga apa yang disampaikan dalam buku ini dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari solusi dalam menjaga kekayaan laut Indonesia.

Sorong, 01 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 Pendahuluan.....	1
Indonesia dan Kekayaan Sumber Daya Kelautan	1
Terumbu Karang Indonesia yang Terdegradasi.....	3
Urgensi Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Perusakan Terumbu Karang.....	4
2 Tinjauan terhadap Terumbu Karang	7
Pengenalan Terumbu Karang.....	7
Fungsi Terumbu Karang	11
Terumbu Karang sebagai Kekayaan Sumber Daya Kelautan Indonesia	13
3 Perlindungan Hukum terhadap Terumbu Karang.....	15
Konsep Perlindungan Hukum	15
Kewajiban Negara atas Perlindungan Terumbu Karang	18
<i>Rule of Law</i> dan Kewenangan Negara terhadap Perlindungan Terumbu Karang	19
4 Penegakan Hukum terhadap Perusakan Terumbu Karang ..	26
Teori dan Konsep Penegakan Hukum	26
Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang.	35
5 Pertanggungjawaban Hukum terhadap Perusakan Terumbu Karang	46
Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum (Pidana).....	46

Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum Perlindungan Terumbu Karang	51
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. 9). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Afif, Zaid. (2018). "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indoneisa." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 : 55–60.
- Agiyanto, Ucuk. (2018). "Penegakan Hukum Di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." *Hukum Ransendental*, no. 4 : 493–503
- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Ed. 2, Cet. 2). Jakarta: Kencana.
- Amiroeddin Sjarif. (1997). *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa"at. (2021). *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum* (Cet. 2). Jakarta: Konstitusi Press.
- Bahar, Ahmad. (2013). *Pedoman Survei Laut*. Makassar: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Hasanuddin.
- Barus, Beta Susanto, Tri Prartono, and Dedi Soedarma. (2018). "Pengaruh Lingkungan Terhadap Bentuk Pertumbuhan Terumbu Karang Di Perairan Teluk Lampung (Environmental Effect on Coral Reefs Life Form in the Lampung Bay)." *Journal of Tropical Marine Science and Technology* 10, no. 3 : 699–709.
- Budiharjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politi*, (Ed. Rev, Cet. 3). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Dahuri. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eka, Wahyu. (2021). *"Raja Ampat: Surga Bawah Laut Dunia."* Forestation FKT UGM,
- Emilianus Afandi. (2005). *Menggugat Negara: Rasionalitas Demokrasi, HAM, Dan Kebebasan*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumnus.
- Friedman, Lawrence M. (2018). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Cet. VI)*. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review (Cet. 1)*. Yogyakarta: UII Press.
- Indrabudi, Terry, and Robert Alik. (2017). "Status Kondisi Terumbu Karang Di Teluk Ambon." *Widyariset* 3, no. 1: 81–94
- Iyam. (2014). *Pemeliharaan Terumbu Karang*. Bandung: Titian Ilmu.
- Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, Cst, S.T Kansil Christine, and Palandeng Godlieb N Mamahit Engelien R. (2010). *Kamus Istilah Hukum (Ed. 1, Cet. 2)*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kantaprawira, Rusadi. (1998). *Hukum Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kasim, Faizal. (2011). *"Pelestarian Terumbu Karang Untuk Pembangunan Kelautan Daerah Berkelanjutan."* Olele.
- LIPI. (2016). *"Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Indonesia."* Jakarta.

- Lotulung, Paulus Efendie. (1994). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.Mayarni, and A. Minarni. (2015). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu*. Riau: Riau University.
- Mahendra Kurniawan dkk. (2007) *.Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Manullang, E. Fernando M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Marbun, S.F. (2016). *Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Cetakan I)*. Yogyakarta: Maha Karya
- Modarsono, (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moh. MD, Mahfud, B. Arif Sidharta, and Dk Sunaryati Hartono. (2013). *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, Dalam, Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mulyosudarmo, Suwoto. (1990). *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan*. Jakarta: Universitas Airlangga.
- Nasution, Marihot. (2022). *Potensi dan Tantangann Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : kajian Literatur*. Hlm. 340

- Notohamidjojo, (2011). O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Nugroho, Wahyu. (2013) "Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Phosphone. (2011). "*Surga Bawah Laut Dunia Adalah Raja Ampat.*" *Indonesia Kaya*, n.d. Qamar, Nurul. *Percikan Pemikiran Tentang Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum (Cet. 8)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. (2020). *Hukum Lingkungan Di Indonesia (Ed. 3)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Roihanah, Rif'ah. (2015). "*Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan.*" *Justicia Islamica*.
- Rusadi Kantaprawira, (1998). *Hukum Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 37–38).
- Sauyai, Ruben. (2017). "*Kerusakan Terumbu Karang Di Raja Ampat Lebih Besar Dari Yang 1.600m2.*" BBC News Indonesia.
- Schmid, J.J. von. (1998). *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*. Jakarta: Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta, B. Arief. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeroso. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum (Ed.1, Cet. 15)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sugeno, Dendy. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiarto, Umar Said. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia (Ed.1, Cet.3)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, Budi. (2015). "Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia (*The Existence of the Judge Made Laws in Dynamic Political Process of Legislation in Indonesia*)."
Jurnal RechtsDinding.
- Sukma, Novira Maharani. (2017). "Analisis Yuridis Pembatalan Perda Oleh Menteri Dalam Negeri."
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.
- Syafrudin, Ateng. (2000). "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab."
Jurnal Pro Justisia.
- Souter, DW dan O. Linden. (2000). *The health and future of coral reef systems*. Ocean & Coastal Management.
- Sulfara (1991). *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya, (Cet. 2)*. Bandung: Mandar Maju.
- Suwoto Mulyosudarmo, (1990), *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan* (Jakarta: Universitas Airlangga, 30.
- Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Wahid, M. Yunus. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Wijayanti, Asri. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Nur Basuki. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Zurba, Nabila. (2019). *Pengenalan terumbu karang, sebagai pondasi utama laut kita*. Lhoksumawe: Unimal Press.